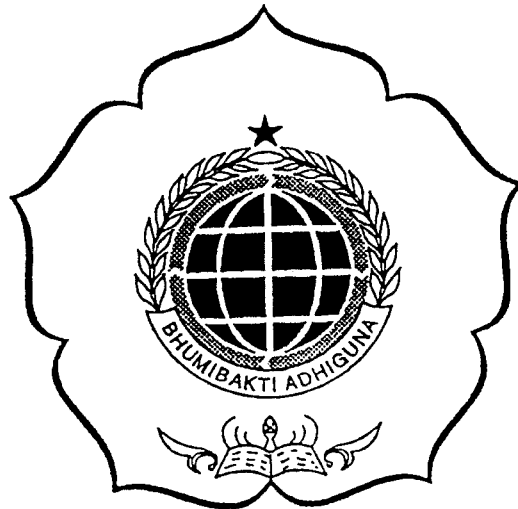


**ANALISIS JENIS DAN LOKASI INDUSTRI HASIL PERTANIAN  
DAN KEHUTANAN POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN  
DI KABUPATEN CIREBON**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV  
Jurusan Perpetaan**



Disusun oleh :

**INDRA MACHPRIYADI**

**NIM : 9651026**

## INTISARI

Berdasarkan SK Gubernur Jawa barat no. 593/SK. 629-BAPPEDA/90 tentang Penetapan Pemanfaatan Lahan Kawasan Industri di Jawa Barat ditentukan 18.000 Ha. Kawasan industri yang tersebar di 9 kabupaten dan salah satunya adalah berlokasi di wilayah penelitian (Kabupaten Cirebon) seluas 500 Ha, akan tetapi hingga saat ini kegiatan perindustrian di Kabupaten Cirebon tersebut belum terealisasi.

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis industri hasil pertanian dan kehutanan apa yang dapat dikembangkan di Kabupaten Cirebon serta mengetahui lokasi yang potensial untuk pengembangan jenis industri tersebut. Metode yang digunakan untuk menentukan jenis industri potensial dengan menggunakan metode LQ yaitu untuk mengetahui kondisi surplus suatu industri. kemudian menilai jenis industri melalui metode Analisis Pergeseran Diperensial (Shift Analisis).

Dari penggabungan kedua metode tersebut diperoleh urutan jenis industri potensial dan selanjutnya dari urutan tersebut dipilih lagi industri yang paling potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Cirebon, maka terpilih industri paling potensial yaitu industri kayu dan barang-barang dari kayu, rotan, rumput dan bambu.

Setelah jenis industri potensial terpilih diketahui selanjutnya menentukan lokasi industri yang cocok sebagai lokasi pengembangan industri terpilih dengan melakukan penilaian lokasi yaitu menilai faktor penentu lokasi sbb: faktor aksesibilitas, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan bahan bakupersediaan tanah untuk industri, Utilitas (sumber air bersih dan listrik).

Hasil penilaian akhir yang diperoleh dari serangkaian analisis diatas maka jenis industri yang potensial dan sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten Cirebon berdasarkan prioritas pengembangan yaitu Industri kayu dan barang-

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Kerangka Pemikiran.....	12
C. Hipotesis.....	15
D. Definisi Operasional.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	17
B. Teknik Pengumpulan Data.....	17
C. Jenis Data.....	18
D. Teknik Analisa Data.....	19
<b>BAB IV TINJAUAN WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Keadaan fisik Wilayah.....	26
1. Letak Wilayah.....	26
2. Topografi.....	28
3. Hidrologi.....	28
4. Kemampuan Tanah.....	29
5. Jenis Tanah.....	31
6. Penggunaan Tanah.....	32

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN	
A. Sasaran Pembangunan Sektor Industri.....	41
1. Kondisi Sektor Industri .....	41
2. Persediaan Tanah Untuk Industri .....	46
3. Bahan Baku .....	47
4. Persebaran Lokasi Industri .....	48
B. Analisis Data .....	50
1. Jenis-Jenis Industri Hasil Pertanian Dan Kehutanan .....	50
2. Jenis Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan Yang Berpotensi Untuk di Kembangkan .....	52
3. Penentuan Lokasi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.....	54
a. Persediaan Tanah Untuk Industri.....	56
b. Ketersediaan Tenaga Kerja.....	57
c. Ketersediaan Bahan Baku.....	60
d. Aksesibilitas .....	61
e. Sumber Air Bersih.....	64
f. Jaringan Listrik.....	65
4. Penilaian Potensi Setiap Kecamatan Berdasarkan Variabel Faktor Penentu Lokasi Industri Yang di Miliki..	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Pokok Agraria menggariskan bahwa tanah harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak secara adil, merata dan lestari. Untuk itu diperlukan pengendalian terhadap pemanfaatan tanah dan tertib penggunaan tanah serta lingkungan hidup. Seiring dengan kemajuan teknologi, pembangunan di atas tanah telah membuka peluang untuk mencari alternatif lain dalam penggunaan tanah, yaitu dengan memanfaatkan tanah sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor antara lain sektor industri, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.

Berdirinya suatu kawasan industri umumnya merangsang tumbuh dan berkembangnya pemukiman, perdagangan, perusahaan jasa dan lain-lain yang sangat membutuhkan tanah. Pembangunan kawasan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor dan kebutuhan investasi untuk menunjang pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan sektor industri telah menjadikan sektor industri sebagai sektor yang memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi dan merupakan sektor

strategis dalam mengarahkan usaha-usaha untuk menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi pembangunan jangka panjang.

Sektor industri harus dikembangkan menjadi makin efisien dan mempunyai daya saing tinggi, disamping tetap padat karya agar juga mampu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja muda yang tumbuh dengan sektor-sektor lainnya sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam memilih industri yang akan dikembangkan harus diperhatikan kondisi setempat, tenaga kerja yang akan dipakai serta penggunaan teknologi yang akan diterapkan sehingga industri tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya.

Penetapan Pemanfaatan Lahan Kawasan Industri di Jawa Barat telah ditentukan 9 Kabupaten DT II sebagai lokasi industri yaitu :

1. Kabupaten Serang            3.500 Ha
2. Kabupaten Tangerang       3.000 Ha
3. Kabupaten Bogor            500 Ha
4. Kabupaten Bekasi            3.000 Ha
5. Kabupaten Karawang        5.500 Ha
6. Kabupaten Purwakarta       1.000 Ha
7. Kabupaten Bandung        600 Ha
8. Kabupaten Sumedang        400 Ha
9. Kabupaten Cirebon         500 Ha

Kawasan industri yang dimaksud adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh pengusaha kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kebijaksanaan bidang ekonomi (industri) sangat mendukung terhadap kegiatan industri seperti yang terdapat dalam Keppres No. 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri menyebutkan bahwa perkembangan kawasan industri bertujuan untuk :

1. mempercepat pertumbuhan industri di daerah
2. memberikan kemudahan bagi kegiatan industri
3. mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri
4. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Kecenderungan pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Cirebon untuk masa mendatang diperkirakan tinggi mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Kebijakan mengenai pengalihan kawasan industri ke wilayah lain didasarkan pada harga tanah yang relatif murah dan mempunyai aksesibilitas yang relatif tinggi terhadap orientasi pemasaran barang produksi, terutama dekat ke pelabuhan laut Cirebon.
2. Kabupaten Cirebon merupakan daerah industri diantara Jakarta-Surabaya. Kecenderungan perkembangan daerah perindustrian dan ada pada jalur

transportasi ini terdapat kemudahan dari lokasi bahan baku industri ke tempat produksi

3. Adanya Kebijakan Pemerintah menyediakan tanah untuk industri di tanah yang tidak produktif, yang sedapat mungkin tidak merugikan tanah yang dimiliki masyarakat setempat.

Keadaan daerah industri merupakan daerah strategis, karena selain dilalui jaringan regional, juga tersedianya pelabuhan laut. Dengan demikian adanya pengembangan industri di Kabupaten ini secara makro telah memiliki prasarana ekonomi yang lengkap. Strategis yang dimaksud oleh pemerintah Kabupaten Cirebon ialah industri yang memenuhi kebutuhan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Selain itu kegiatan industri akan dapat menyerap tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja yang ada di Kabupaten Cirebon dan memberikan pendapatan bagi pemerintah kabupaten, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya digunakan untuk pembangunan daerah.

Penentuan kawasan industri yang telah dilakukan oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu upaya pengembangan industri, akan tetapi penentuan kawasan industri saja sebenarnya belum cukup menjamin terlaksananya pengembangan industri tersebut. Secara garis besar masalah pokok yang perlu diatasi sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut yaitu ; kebijakan kawasan industri tersebut



industri di Kabupaten Cirebon mempunyai beberapa keuntungan yang antara lain :

1. Dapat mengetahui jenis industri yang potensial untuk dikembangkan, karena tidak semua jenis industri yang ada di Kabupaten Cirebon potensial untuk dikembangkan.
2. Mempermudah dalam pelaksanaan izin lokasi, karena apabila sudah ada suatu kawasan industri maka industri yang akan didirikan pada kawasan tersebut tidak perlu izin lokasi lagi.
3. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Cirebon tidak menutup kemungkinan munculnya industri lain disamping industri yang telah ada.
4. Munculnya industri-industri baru diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi para penduduk setempat dan dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat.
5. Pengembangan jenis industri hasil pertanian dan kehutanan dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat.

Berdasarkan bahasan tersebut maka perumusan masalah penelitian ini adalah perlu dikembangkannya suatu jenis industri yang sesuai di daerah penelitian melalui ***“Analisis jenis dan lokasi industri hasil pertanian dan kehutanan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Cirebon ”***

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis industri hasil pertanian dan kehutanan apa yang dapat dikembangkan di Kabupaten Cirebon ?
2. Secara spesifik, dimana lokasi yang potensial untuk pengembangan jenis-jenis industri hasil pertanian dan kehutanan tersebut. ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dimaksud adalah bahwa penelitian yang dilakukan meliputi jenis industri hasil pertanian dan kehutanan yang ada di Kabupaten Cirebon, serta untuk penentuan lokasi dibatasi pada penentuan area geografis yang dapat dipertimbangkan sebagai lokasi industri. Dalam hal ini, area geografis tersebut adalah lingkup kecamatan, berarti penilaian dilakukan terhadap 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui jenis industri yang cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Cirebon, khususnya jenis industri hasil pertanian dan kehutanan yang potensial untuk dikembangkan.
2. Untuk mengetahui lokasi yang potensial untuk pengembangan jenis industri hasil pertanian dan kehutanan tersebut

## **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan salah satu masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam pengembangan kegiatan industri, khususnya jenis industri hasil pertanian dan kehutanan serta lokasi industri sebagai lokasi pengembangan industri.
2. Penelitian ini berguna juga untuk masukan bagi pemerintah, sebagai arahan dalam penentuan izin lokasi yang akan diberikan untuk pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan jenis industri potensial, serta diharapkan dapat lebih mempermudah dalam pelaksanaan izin lokasi untuk kawasan yang akan dikembangkan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon mengenai penentuan kawasan industri didasarkan pada arahan tata ruang yang arahnya untuk lokasi industri, mempunyai aksesibilitas yang relatif tinggi terhadap orientasi pemasaran barang produksi terutama dekat ke pelabuhan laut Cirebon.
2. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah industri yang ada diantara wilayah Jakarta - Surabaya. Hal ini menimbulkan adanya kecenderungan perkembangan daerah industri pada jalur Pantai Utara Jawa (Pantura).
3. Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang strategis, karena selain dilalui jaringan jalan regional dan kereta api juga tersedia pelabuhan laut, dengan demikian adanya pengembangan industri di Kabupaten Cirebon ini secara makro telah memiliki prasarana ekonomi yang lengkap.
4. Dari penilaian jenis industri yang ada dengan menggunakan metode LQ dan metode pergeseran diferensial di Kabupaten Cirebon, maka diperoleh jenis industri yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Cirebon yaitu jenis **Industri Kayu dan barang-barang dari kayu, Rotan, Rumput dan bambu**, karena selain hasil produksinya mempunyai kemampuan surplus juga orientasi pemasarannya mempunyai peluang ekspor.

untuk pengembangan kegiatan jenis industri potensial terpilih yaitu di Kecamatan **Astanajapura** yang mempunyai potensi Sangat Tinggi.

6. Terpilihnya Kecamatan Astanajapura sebagai lokasi industri potensial karena berdekatan dengan wilayah Kodya Cirebon dan mempunyai persediaan tanah yang cukup luas untuk dijadikan sebagai kawasan industri, serta mempunyai jarak yang relatif dekat dengan Pelabuhan Laut Cirebon. Selain itu juga dilalui jalan propinsi sehingga dilihat dari aksesibilitasnya sangat mudah untuk dicapai baik dalam segi pemasaran juga dalam perolehan bahan baku. Selain itu ketersediaan tenaga kerja yang cukup tinggi yaitu mencapai 65.009 orang. Dari faktor utilitas untuk air bersih dan listrik telah terlayani oleh PDAM dan PLN.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam arahan lokasi untuk kawasan industri hendaknya benar-benar melaksanakan arahan penggunaan tanah dan perkiraan kebutuhan tanahnya, berdasarkan pada luas kebutuhan tanah untuk Industri yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur DT I Jawa Barat Nomor 593/SK/629-BAPPEDA Tahun 1990.
2. Usaha yang akan dilaksanakan perlu diarahkan agar lebih intensif dan seksama dari pemerintah, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan tersebut.

3. Untuk menunjang pengembangan kegiatan industri tersebut perlu diterapkan peraturan yang menyatakan bahwa kegiatan industri baru harus berada di lokasi industri yang telah ditetapkan.
4. Perlu adanya penentuan dari pemerintah mengenai jenis-jenis industri yang sesuai untuk dapat ditempatkan pada kawasan yang layak dijadikan sebagai kawasan industri.
5. Adanya penataan ruang yang lebih akurat dalam menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan industri, sehingga diharapkan kawasan yang sudah berjalan dapat langsung berjalan.
6. Perlu adanya perhatian yang besar bagi pemerintah maupun pihak swasta dalam perkembangan industri tersebut sehingga dapat direncanakan untuk pengembangan dimasa yang akan datang.
7. Untuk lokasi kecamatan yang tidak terpilih sebagai suatu kawasan industri dapat dikembangkan sebagai lokasi kegiatan lainnya dalam rangka keseimbangan struktur pembangunan semua wilayah, seperti kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan dimana kegiatan ini dapat menunjang untuk sumber bahan baku bagi kegiatan industri atau kegiatan pengolahan komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Dajan, Anto. 1983. Pengantar Metode Statistik, jilid 1 LP3ES. Jakarta
2. Djoyodipuro, Marsudi. 1992. Teori Lokasi FEUI. Jakarta
3. Gunawan, Mira P. 1980. Pengantar Teori Lokasi Departemen Planologi ITB. Bandung
4. Hariandry Tavio. 1990. Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Pemilihan Lokasi Industri di Kawasan Industri Pulogadung. Tugas Akhir. Planologi ITB. Bandung.
5. Herutomo Soemadi. 1997. Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
6. Joseph, D.C. dan Lee, E.K. 1990. Standar Perencanaan Tapak. Erlangga (IKAPI). Jakarta.
7. Masri. S., Sofian Z. 1987. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta
8. Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Ghalia
9. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 1996. Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta
10. Surakhmad, Winarno. 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito. Bandung
11. Suwardjoko, Warpani. 1984. Analisis Kota dan Daerah ITB. Bandung
12. Tri, Widiastuti. 1993. Pemilihan Jenis dan Lokasi industri di Kabupaten Sukabumi. Tugas Akhir. Jurusan Planologi Unisba Bandung
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri.
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/MPP/Kep/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 Tentang Standar Teknis Kawasan Industri